



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah

Andrew Wijaya¹, Mohammad Saleh²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, 888drew88@gmail.com.

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com.

Corresponding Author: 888drew88@gmail.com

Abstract: *The advancement of information technology and globalization presents challenges for governments worldwide to create governance that is more efficient, transparent, and accountable. One of the efforts made is the implementation of the Electronic Government System (SPBE), which utilizes information and communication technology (ICT) to improve public service quality and administrative efficiency. In Indonesia, SPBE aims to digitize various government processes to create transparency, accountability, and operational efficiency. However, despite various supporting legal policies, the implementation of SPBE at the regional level still faces several challenges, including imbalances in technological infrastructure, human resource readiness, and data security issues. This study aims to analyze the implementation of SPBE in Indonesian regional governments and explore key factors that support its success in enhancing transparency and creating good governance. The research findings are expected to provide strategic recommendations for regional governments in optimizing the implementation of SPBE to achieve good governance objectives and improve public service quality.*

Keyword: *Electronic Government System (SPBE), transparency, public service, good governance, information technology.*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi membawa tantangan bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Di Indonesia, SPBE bertujuan untuk mendigitalisasi berbagai proses pemerintahan guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, meskipun terdapat berbagai kebijakan hukum yang mendukung, implementasi SPBE di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakseimbangan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, serta masalah keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPBE di pemerintah daerah Indonesia dan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi dan menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE untuk mencapai tujuan good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), transparansi, pelayanan publik, good governance, teknologi informasi.

PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Noor et al., 2022). Salah satu cara yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung penyelenggaraan administrasi negara secara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Indonesia, penerapan SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (PANRB, 2022).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan pendekatan di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan dalam administrasi pemerintahan. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan perangkat teknologi, seperti komputer, internet, dan aplikasi perangkat lunak, guna memodernisasi operasi pemerintah dan memfasilitasi interaksi yang lebih lancar antara pemerintah dan masyarakat. Sistem ini memanfaatkan kemampuan teknologi untuk mendigitalisasi banyak aspek operasional pemerintahan, yang tidak hanya menciptakan efisiensi dalam administrasi, tetapi juga meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Adapun fitur utama dari SPBE adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik online
2. Transparansi dan Akuntabilitas
3. Efisiensi Operasional
4. Komunikasi antar Lembaga Pemerintah
5. Keamanan Informasi

Penerapan SPBE di Indonesia dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pemerintahan. Melalui SPBE, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan administratif. Dengan demikian, SPBE diharapkan mampu mendukung prinsip good governance, yaitu menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif (Ramelan et al., 2023).

Dalam konteks good governance, prinsip transparansi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. SPBE menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang sebelumnya sulit diperoleh, seperti anggaran daerah, proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Dengan akses informasi yang lebih terbuka, publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

SPBE menjanjikan peningkatan transparansi, penerapannya tidak selalu berjalan lancar. Berbagai tantangan teknis, administratif, dan kultural kerap muncul dalam implementasi sistem ini. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan infrastruktur teknologi di seluruh

daerah Indonesia. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung SPBE, sementara daerah lainnya sudah memiliki infrastruktur yang lebih memadai. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi SPBE akan sulit mencapai tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Selain itu, untuk menerapkan SPBE dengan efektif, diperlukan perubahan dalam budaya birokrasi pemerintahan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap teknologi. Hal ini juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah agar mereka mampu mengelola sistem berbasis elektronik dengan baik. Tanpa adanya kesiapan SDM yang memadai, penerapan SPBE bisa terhambat, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti kesalahan dalam pengelolaan data atau penyalahgunaan sistem.

Salah satu landasan hukum yang mendasari penerapan SPBE adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Beberapa asas tersebut, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi, sangat relevan dengan tujuan penerapan SPBE. UU ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain asas-asas umum pemerintahan yang baik, implementasi SPBE juga harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat. Dukungan kebijakan ini sangat penting untuk mendorong keberhasilan implementasi SPBE di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan arahan yang jelas mengenai regulasi, standar, serta prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE, agar tidak ada perbedaan pengelolaan yang dapat merugikan masyarakat.

Namun, meskipun berbagai kebijakan dan asas hukum telah diterapkan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance melalui SPBE. Di banyak daerah, meskipun ada kebijakan yang mendukung digitalisasi pemerintahan, penerapannya seringkali tidak maksimal. Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SPBE antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi, kurangnya keterampilan SDM, serta infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh daerah.

Meskipun SPBE memiliki banyak manfaat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan infrastruktur TI, keamanan, dan pelatihan SDM. Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung SPBE tidak selalu merata di seluruh daerah, dengan beberapa wilayah mungkin kekurangan fasilitas atau teknologi yang memadai untuk mengoperasikan sistem digital. Selain itu, masalah keamanan siber menjadi perhatian utama, karena data sensitif yang dikelola oleh pemerintah perlu dilindungi dari ancaman peretasan dan kebocoran data. SPBE membutuhkan perubahan dalam budaya birokrasi dan kesiapan SDM untuk mengadopsi teknologi baru. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, pegawai pemerintah mungkin kesulitan mengelola sistem berbasis elektronik secara efektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE.

Dikarenakan hal yang demikian maka diperlukan sebuah usaha untuk menganalisis lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan SPBE dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan apa saja faktor kunci yang mendukung keberhasilan penerapannya di tingkat pemerintah daerah. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk memastikan implementasi SPBE dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik?

2. Apa saja faktor kunci yang mendukung keberhasilan penerapan SPBE di pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*)

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan penelitian hukum, yakni ilmu hukum memiliki sifat yang preskriptif, dimana objek dari ilmu hukum merupakan sebuah koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, dan antara aturan hukum, norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) dengan norma hukum, adapun dalam penelitian hukum yakni menemukan kebenaran koherensi (Marzuki, 2022) Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada (*Ibid*) serta pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah Dapat Meningkatkan Transparansi Dalam Pelayanan Publik

E-Government merupakan suatu kata kunci terkait SPBE, Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada sektor publik, yang sebelumnya lebih dahulu diterapkan di sektor privat. Perubahan ini tercermin dalam transformasi sistem-sistem konvensional yang manual menjadi sistem digital yang lebih modern dan efisien. Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik memengaruhi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan efektif. Hal ini membuka jalan bagi penerapan e-government dalam pemerintahan untuk menjalankan berbagai aktivitas administratif dengan cara yang lebih optimal.

Berbagai definisi terkait e-government telah dikemukakan oleh sejumlah ahli, lembaga pemerintah, maupun organisasi internasional. Sebagai contoh, World Bank mendefinisikan e-government sebagai berikut:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions (World Bank, 2002)

Definisi tersebut menekankan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk mengubah hubungan antara warga negara, sektor bisnis, dan unit pemerintah lainnya. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan penyampaian layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga negara, tetapi juga meningkatkan interaksi dengan dunia bisnis, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang lebih luas, dan mengelola pemerintahan secara lebih efisien. Beberapa manfaat yang dihasilkan dari penerapan e-government antara lain adalah pengurangan tingkat korupsi, peningkatan transparansi, kenyamanan lebih besar bagi masyarakat, peningkatan pendapatan, serta efisiensi biaya.

Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa e-government memiliki ruang lingkup yang luas. Tidak hanya mencakup seluruh unit dalam organisasi pemerintahan, tetapi juga melibatkan berbagai mitra eksternal, seperti:

1. Karyawan atau pegawai dalam lembaga pemerintah;
2. Masyarakat umum;

3. Pelaku bisnis;
4. Lembaga pemerintah lainnya;
5. Pemasok atau penyedia barang dan jasa.

Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) memberikan definisi yang lebih sederhana mengenai e-government, yaitu:

E-Government is the application of the Information and Communication Technology (ICT) by government agencies (UNDP, 2008).

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Clay G. Wescott, yang mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan publik, memberikan akses informasi yang luas, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Wescott, 2004). Dalam definisinya, Wescott juga menekankan pentingnya e-government sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Heeks (2006) dalam definisinya lebih fokus pada peran "government" dalam e-government, dengan menekankan bahwa meskipun teknologi informasi berperan penting, fungsi utama pemerintah tetaplah menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur masyarakat. Oleh karena itu, e-government harus dipandang dari dua sisi: pertama, sebagai pendekatan sektor publik yang berfokus pada pelayanan publik, dan kedua, sebagai pendekatan teknologi yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, beberapa definisi e-government di atas menyiratkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki interaksi antar stakeholder, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Manfaat lainnya yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah;
3. Meningkatkan transparansi dalam administrasi pemerintahan;
4. Memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya pemerintah;
5. Memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang lebih mudah dan cepat.

Pada penerapannya, SPBE sesungguhnya terdiri dari 5 (lima) aspek utama yang masing-masing memiliki peranan keberlangsungan demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai uraian misalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. E-Government, sebagai inti dari SPBE, berfokus pada digitalisasi berbagai layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara online. Dengan penerapan e-Government, proses administratif yang sebelumnya memerlukan interaksi tatap muka dapat dilakukan lebih cepat dan efisien melalui platform elektronik. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. E-Government membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien, memungkinkan aliran informasi yang lebih cepat, serta mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat.

E-Citizen menjadi elemen penting dalam SPBE yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Prinsip ini menjadikan masyarakat sebagai mitra yang berperan penting dalam sistem pemerintahan, tidak hanya sebagai penerima layanan tetapi juga sebagai penyumbang ide dan umpan balik bagi kebijakan pemerintah. Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi terkait

kebijakan pemerintah, memberikan opini, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Proses ini memastikan bahwa suara rakyat didengar, menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. E-Citizen juga memungkinkan warga negara untuk merasa lebih terhubung dengan pemerintah, memperkuat rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap keberlanjutan kebijakan publik.

Partisipasi elektronik (e-Participation) adalah prinsip berikutnya yang mengubah cara masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan e-Participation, pemerintah dapat menyediakan platform bagi warga untuk memberikan masukan melalui jajak pendapat, diskusi online, atau konsultasi publik mengenai kebijakan yang sedang disusun. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan umpan balik, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi. Menghilangkan batasan geografis dan waktu, e-Participation memungkinkan warga di berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Dengan demikian, e-Participation menjadi cara yang lebih demokratis untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan publik.

Prinsip e-Democracy melangkah lebih jauh dengan memperkuat praktik demokrasi melalui pemanfaatan teknologi. E-Democracy memperkenalkan alat dan platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam proses politik dan administratif. Misalnya, pemungutan suara elektronik atau pemantauan pemilu online yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, platform-platform ini juga dapat digunakan untuk memantau jalannya kebijakan publik, mengakses hasil pemilu secara real-time, atau memberi suara dalam keputusan politik penting. E-Democracy memberi ruang bagi warga negara untuk terlibat secara langsung dalam berbagai proses pemerintahan, mempercepat respons terhadap masalah politik, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel.

Layanan elektronik (e-Services) adalah aspek praktis dari SPBE yang melibatkan penyediaan layanan publik secara online. Dengan e-Services, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi pemerintah tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan. Layanan ini mencakup segala hal, mulai dari pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, hingga pembuatan dokumen penting seperti akta kelahiran atau izin usaha. Penerapan e-Services mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan layanan publik, serta meningkatkan efisiensi proses administrasi pemerintah. Selain itu, e-Services juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administratif yang dapat terjadi dalam proses manual, memastikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

Penerapan e-Government tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memperkenalkan tingkat efisiensi baru dalam operasional pemerintahan. Sistem digital memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan berbasis kertas, pemerintahan dapat menghemat waktu dan biaya operasional. Hal ini juga memperkuat transparansi, karena data dapat diakses secara terbuka oleh publik, memungkinkan mereka untuk memantau kebijakan dan tindakan pemerintah secara lebih langsung. Efisiensi ini juga berdampak pada efektivitas pemerintahan dalam mengalokasikan sumber daya, serta dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Pentingnya e-Citizen dalam SPBE terletak pada peran aktif masyarakat dalam proses politik dan kebijakan publik. Dengan meningkatnya partisipasi warga melalui platform digital, pemerintah dapat lebih mudah menilai kebutuhan masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih responsif. E-Citizen mendorong inklusi sosial, memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk ikut serta

dalam pengambilan keputusan. Selain itu, adanya feedback langsung dari masyarakat dapat memperbaiki kualitas layanan publik yang diberikan. Melalui e-Citizen, pemerintah juga dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini mengenai kondisi sosial dan ekonomi di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan realitas di lapangan.

Partisipasi yang lebih luas melalui e-Participation juga memberikan dampak signifikan pada kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menyediakan saluran bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah, e-Participation mempercepat proses demokrasi. Pemerintah dapat segera menanggapi kekhawatiran atau kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat, membuat keputusan yang lebih terinformasi dan didukung oleh berbagai pihak. Partisipasi yang lebih besar ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup segala bentuk konsultasi publik yang berkelanjutan, menciptakan ruang bagi warga untuk terus terlibat dalam proses pemerintahan.

Penerapan e-Democracy menjadi kunci dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi di era digital. Teknologi memberi masyarakat lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang sebelumnya hanya terbatas pada pemilihan umum atau pemilihan pejabat. Dengan adanya e-Democracy, proses pengambilan keputusan politik menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak hanya dapat memilih pemimpin, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemimpin terpilih. Selain itu, e-Democracy meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena setiap keputusan dapat diawasi dan dipertanyakan secara terbuka.

Akhirnya, keberhasilan implementasi e-Services dalam SPBE sangat bergantung pada kemudahan penggunaan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Layanan yang mudah diakses melalui aplikasi atau portal resmi pemerintah mempermudah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, untuk mendapatkan layanan publik tanpa harus bepergian jauh. Dengan demikian, e-Services juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan publik. Selain itu, pemerintah dapat mengelola layanan lebih baik dengan mengumpulkan data pengguna yang lebih terstruktur, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Penerapan e-Services secara luas akan memberikan masyarakat kemudahan yang signifikan dalam mengakses berbagai layanan vital, menghemat waktu, serta meningkatkan kepuasan warga terhadap pemerintahan.

Melalui implementasi kelima prinsip tersebut, yaitu e-Government, e-Citizen, e-Participation, e-Democracy, dan e-Services, SPBE menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif. Dengan bantuan teknologi, SPBE memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan layanan publik yang lebih baik dan lebih mudah diakses.

B. Faktor Kunci Yang Mendukung Keberhasilan Penerapan SPBE Di Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*)

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai perspektif. Torki Altameem, Mohammad Zairi, dan Sarmad Alshawi (2006) dalam penelitian mereka menyarankan bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi SPBE di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mereka mengidentifikasi berbagai framework implementasi SPBE dan menyoroti faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi keberhasilannya secara komprehensif. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yaitu faktor tata kelola, faktor teknis, dan faktor organisasi. Secara keseluruhan, studi ini mengidentifikasi sebanyak 24 faktor yang relevan dengan keberhasilan implementasi SPBE yang perlu diperhatikan oleh

pemerintah dalam upaya menciptakan Good Governance (Altameem, Zairi, & Alshawi, 2006).

Faktor tata kelola dalam studi ini mencakup enam elemen utama yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi SPBE. Faktor teknis terdiri dari tujuh elemen yang meliputi infrastruktur teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak, serta pentingnya aspek keamanan dalam pengelolaan data. Sedangkan faktor organisasi terdiri dari sebelas elemen yang mencakup budaya organisasi, struktur organisasi, serta manajemen sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kelancaran implementasi SPBE. Oleh karena itu, faktor-faktor ini harus diperhatikan secara holistik dalam memastikan keberhasilan implementasi SPBE untuk mewujudkan Good Governance (Altameem et al., 2006).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Luiz Antonio Joia (2005) mengkaji faktor-faktor keberhasilan implementasi SPBE dalam konteks G2G (Government to Government) di institusi keuangan di Brasil. Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, Joia (2005) menemukan tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPBE, yaitu keamanan, budaya organisasi, dan pelatihan. Keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah, sementara budaya organisasi yang mendukung inovasi serta pelatihan yang tepat bagi pegawai sangat diperlukan agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru. Faktor-faktor ini menjadi penentu utama dalam kelancaran implementasi SPBE di berbagai sektor pemerintahan (Joia, 2005).

Di Kuwait, Helaiel Almutairi (2010) melakukan penelitian terkait proyek SPBE yang berlangsung antara 2002 hingga 2007 dengan melibatkan 2.000 responden dari 18 kementerian. Penelitian ini menghasilkan temuan penting mengenai dua kelompok faktor penentu keberhasilan implementasi SPBE, yakni faktor personal dan faktor organisasi. Faktor personal mencakup keterampilan individu dalam menggunakan teknologi serta kesediaan untuk beradaptasi dengan sistem digital yang baru. Sementara itu, faktor organisasi melibatkan dua elemen utama, yaitu struktur organisasi yang mendukung penerapan SPBE dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan dalam mewujudkan perubahan tersebut (Almutairi, 2010).

Sebagai tambahan, penelitian yang dilakukan oleh Huong Ha (2008) di Singapura mengidentifikasi empat kelompok faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi SPBE, yaitu faktor manajerial, faktor teknis, faktor keuangan, dan faktor kebiasaan manusia. Faktor manajerial mencakup kepemimpinan yang efektif dan perencanaan yang matang, yang dapat menjadi dasar bagi implementasi SPBE yang sukses. Faktor teknis berhubungan dengan kesiapan infrastruktur teknologi dan keamanan informasi yang handal, sementara faktor keuangan meliputi penyediaan anggaran yang cukup untuk mendukung implementasi. Faktor kebiasaan manusia menjadi penting karena tingkat penerimaan masyarakat dan aparatur terhadap teknologi juga berpengaruh pada keberhasilan sistem (Ha, 2008).

Dengan membandingkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat sembilan faktor yang muncul secara berulang dalam berbagai penelitian. Sembilan faktor tersebut terdiri dari keamanan, budaya organisasi, pelatihan, visi dan tujuan, perencanaan strategis, dukungan pimpinan, infrastruktur, keuangan, dan kolaborasi antar stakeholder. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji sembilan faktor tersebut dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi SPBE di Indonesia, terutama dalam konteks perwujudan Good Governance (Ha, 2008).

Keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam konteks implementasi SPBE. Keamanan informasi dan perlindungan data merupakan elemen yang tidak bisa ditawar

dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa adanya jaminan keamanan, kepercayaan masyarakat terhadap SPBE akan terganggu. Begitu pula dengan budaya organisasi, yang menjadi faktor yang tidak kalah penting. Organisasi yang memiliki budaya yang mendukung inovasi dan perubahan, serta terbuka terhadap adopsi teknologi baru, akan lebih mudah mengimplementasikan SPBE secara efektif. Sementara itu, pelatihan menjadi faktor penentu lain yang sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur negara memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola dan menggunakan teknologi yang ada (Altameem et al., 2006; Ha, 2008)

Selain itu, visi dan tujuan yang jelas mengenai implementasi SPBE juga menjadi faktor yang sering disebutkan dalam penelitian ini. Visi yang jelas akan memberikan arah dan tujuan yang terukur dalam setiap tahap implementasi. Begitu pula dengan perencanaan strategis yang matang, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan SPBE. Pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif untuk melaksanakan SPBE secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Dukungan pimpinan yang konsisten juga menjadi faktor yang tidak kalah penting, karena tanpa komitmen dari pimpinan, implementasi SPBE tidak akan berjalan dengan baik (Joia, 2005; Almutairi, 2010).

Infrastruktur yang memadai menjadi faktor teknis yang sangat krusial dalam memastikan bahwa implementasi SPBE dapat berjalan dengan lancar. Penyediaan teknologi yang tepat dan memadai akan mendukung kelancaran operasional sistem pemerintahan elektronik. Faktor keuangan, yang berkaitan dengan penyediaan anggaran yang cukup, juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan SPBE yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta turut memperkuat implementasi SPBE. Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara sektor publik dan privat, akan mempermudah adopsi teknologi dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (Almutairi, 2010; Ha, 2008).

Di Indonesia, beberapa penelitian terkait SPBE juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, serta pelatihan aparatur negara menjadi kunci sukses dalam implementasi SPBE. Menurut Nugroho et al. (2017), SPBE di Indonesia memerlukan dukungan penuh dari pimpinan pemerintah, serta adanya kebijakan yang mengatur dan memfasilitasi penerapan teknologi di sektor publik. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi yang baik dan pemerataan akses internet menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendukung implementasi SPBE yang efektif di Indonesia (Nugroho et al., 2017). Selain itu, penelitian oleh Masyhuri dan Rachmawati (2018) menunjukkan bahwa penerapan SPBE di Indonesia menghadapi tantangan yang besar terkait dengan kesenjangan digital antara daerah, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi (Masyhuri & Rachmawati, 2018).

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa sembilan faktor yang muncul dalam berbagai penelitian internasional dan nasional di atas, berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi SPBE di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam dan memberikan rekomendasi bagi implementasi SPBE yang lebih optimal di Indonesia, terutama dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance.

Penelitian yang dilakukan oleh Wescott (2004) juga memberikan wawasan terkait dengan elemen-elemen penting dalam keberhasilan implementasi SPBE. Menurutnya, untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik melalui teknologi, e-government atau SPBE harus melibatkan pendekatan yang mencakup aspek politik, sosial, dan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor yang menentukan dalam menciptakan sistem yang efisien dan transparan. Selain itu, Heeks (2003) mengingatkan pentingnya mengelola risiko yang muncul dalam implementasi

SPBE dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk meminimalkan kegagalan yang dapat terjadi selama proses tersebut.

Lebih jauh lagi, UNDP (2008) menekankan bahwa untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE di negara berkembang seperti Indonesia, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif. Hal ini mencakup perhatian terhadap ketimpangan digital, keterampilan teknis sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa adanya perhatian serius terhadap masalah-masalah ini, pemerintah akan kesulitan dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance melalui SPBE.

Melalui penambahan literatur dari Indonesia dan internasional, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE di Indonesia bergantung pada sejumlah faktor yang harus diperhatikan secara bersamaan. Faktor-faktor seperti keamanan informasi, budaya organisasi, pelatihan, perencanaan strategis, dan dukungan pimpinan harus dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang dapat menjadi kunci dalam implementasi SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencapai tujuan Good Governance di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah signifikan dalam mewujudkan Good Governance melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor publik. SPBE tidak hanya mengubah cara pemerintah menyelenggarakan administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Melalui digitalisasi layanan, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sistem manual, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mempercepat pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspek utama dalam implementasi SPBE mencakup e-Government, e-Citizen, e-Participation, e-Democracy, dan e-Services. Masing-masing aspek ini memberikan kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan terbuka. e-Government berfokus pada digitalisasi administrasi dan layanan publik, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. e-Citizen menekankan pada peran aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam kebijakan publik, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. e-Participation memperluas ruang bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital, sementara e-Democracy memastikan bahwa proses demokrasi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. e-Services mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara efisien dan mengurangi kesenjangan akses di daerah terpencil.

REFERENSI

- Almutairi, H. (2010). *Key success factors in e-Government projects in Kuwait*. International Journal of Information Management, 30(3), 211-217.
- Altameem, T., Zairi, M., & Alshawi, S. (2006). *Critical success factors for implementing e-government initiatives in the public sector: A review and analysis*. Journal of Information Technology, 21(1), 45-55.
- Ha, H. (2008). *Success factors for e-Government implementation in Singapore*. Asian Journal of Information Technology, 7(10), 343-349.
- Heeks, R. (2006). *Understanding e-Government: Information systems in public sector administration*. Sage Publications.

- Joia, L. A. (2005). *Factors influencing the success of government-to-government e-Government in Brazil*. *International Journal of Electronic Government Research*, 1(3), 23-40.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (17th ed.). prenada media.
- Masyhuri, M., & Rachmawati, E. (2018). *Tantangan Implementasi SPBE di Indonesia: Analisis Kesenjangan Digital*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 45-59.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik). In *Bildung* (Vol. 11, Issue 1).
- Nugroho, R., Kurniawan, R., & Wicaksono, A. (2017). *Kesiapan Indonesia dalam Implementasi SPBE: Tantangan dan Strategi*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1), 12-27.
- PANRB. (2022). *Materi Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE*.
- Ramelan, A., Laksono, P. W., & Illahi, G. R. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas, 1*(Kebumian dan Energi), 63–67. <http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/21>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2008). *E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance*. United Nations.
- Wescott, C. G. (2004). *E-Government in Asia and the Pacific: Building the Knowledge Economy*. Asian Development Bank.
- World Bank. (2002). *E-Government: The key to the knowledge economy*. Washington, D.C.